

Abubakar Eby Hara, Ph.D.

R-4

17

Pengantar

ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI

Dari Realisme sampai Konstruktivisme



Kode Penerbitan: PN-643-02-11

Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: dari Realisme sampai Konstruktivisme
Abu Bakar Eby Hara, Ph.D.

Editor: Mathori A Elwa, Irwan Kurniawan
Pembaca pruf: Tim Nuansa

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan I, April 2011

Diterbitkan oleh:

Penerbit NUANSA

Komplek Sukup Baru No. 23

Ujungberung - Bandung 40619

Telp: 022-76883000, 92293000, Fax: 022-7801410

E-mail: nuansa.cendekia@gmail.com

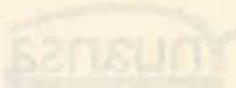
Layanan SMS: 0818638038

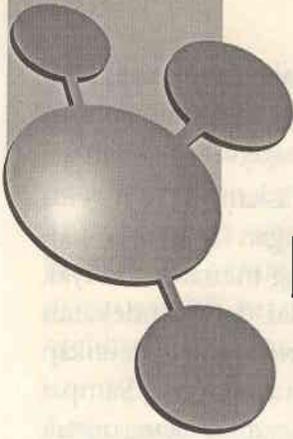
Anggota IKAPI

Desain cover: Tatang Rukyat

Tata Letak: Tank_tea

ISBN: 978-602-8394-43-7





KATA PENGANTAR

Mengapa pemerintah Indonesia tidak mengikuti tekanan publik dalam politik luar negeri terhadap Malaysia? Publik begitu marah dan emosi melihat para aktor dan pemerintah mengambil keputusan politik luar negeri Indonesia begitu lemah dan tak bergigi terhadap Malaysia. Mereka seolah takut dengan Malaysia yang di mata publik jelas-jelas menginjak-injak dan menghina kedaulatan dan martabat bangsa. Sudah banyak sekali, menurut masyarakat, warga Indonesia disiksa, diperlakukan tidak wajar, demikian juga sudah sekian kali perbatasan Indonesia dilanggar oleh Malaysia. Bahkan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan pun raib diambil Malaysia. Belum lagi perairan Ambalat, kini terus dalam incaran Malaysia.

Persoalan ini nampaknya sederhana. Bagi masyarakat, Indonesia adalah negara yang punya kedaulatan penuh, negara besar dan punya pengaruh, sehingga tidak sulit untuk 'memberi pelajaran' dan bertindak tegas terhadap Malaysia. Tapi bagi pemerintah agaknya persoalannya tidak sederhana. Banyak pertimbangan yang harus mereka pikirkan mulai dari hubungan bilateral sampai dengan hubungan dalam konteks ASEAN. Kesalahan meng-

ambil keputusan bagi pemerintah bukan saja berakibat fatal dalam hubungan Indonesia-Malaysia tetapi juga bisa mengancam kestabilan kawasan Asia Tenggara yang telah dibangun sejak lama.

Bagaimana kita memahami dan menjelaskan hal ini, itu merupakan suatu kajian dalam studi hubungan internasional, khususnya kajian analisis politik luar negeri yang menarik. Banyak alternatif penjelasan yang bisa dilakukan, mulai dari pendekatan realisme yang memang mengharuskan Indonesia bersikap dan berlaku tegas dalam diplomasi terhadap Malaysia. Sampai pada penjelasan konstruktivisme yang sekadar dilakukan untuk memahami apa yang dilakukan oleh Indonesia dan apa yang dapat dilakukan selanjutnya dalam diplomasi terhadap Malaysia. Dalam konteks liberalisme, politik luar negeri terhadap Malaysia itu bisa diletakkan dalam suatu *nexus* kerjasama ekonomi dan politik dalam ASEAN yang makin kompleks.

Buku ini mencoba memberi panduan bagi para peminat politik luar negeri, tidak hanya mahasiswa dan akademisi, tetapi juga khalayak ramai yang makin sensitif terhadap setiap kebijakan luar negeri Indonesia. Masyarakat kini makin sadar dan peka terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Selain terhadap Malaysia, kebijakan yang lebih pro-Barat, terlalu lunak pada Israel yang terus menindas rakyat Palestina, yang tidak peka terhadap aspirasi mayoritas masyarakat, akan mendapatkan protes di masyarakat. Masyarakat dengan kata lain melakukan deliberasi atau perdebatan tidak hanya pada isu-isu politik domestik tetapi juga isu internasional di mana Indonesia terlibat.

Selain untuk memahami situasi, memberi penjelasan terhadap *puzzle* yang muncul dalam berbagai kebijakan luar negeri, buku ini juga bermaksud memberi preskripsi, membuka jalan bagi apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam urusan dan masalah luar negeri. Teori dan dasar analisis yang ditawarkan juga dimaksudkan untuk memudahkan kita memahami bahkan memprediksi kebijakan dan keputusan politik luar negeri negara lain.

Untuk memudahkan pembaca, uraian-uraian dalam buku ini dibuat dengan cukup sederhana dengan memilah berdasarkan

paradigma atau perspektif dominan dalam politik luar negeri yang ada selama ini. Perkembangan berbagai perspektif politik luar negeri ini termasuk sangat progresif dengan diperkenalkannya berbagai paradigma baru seperti teori kritis dan konstruktivis. Perkembangan ini adalah juga mengikuti perkembangan perubahan dunia setelah berakhirnya perang dingin. Sebagian pihak melihat dunia semakin damai setelah berakhir perang dingin, sementara pihak yang lain melihat adanya ancaman konflik yang makin besar.

Perdebatan paradigmatis itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang sangat menarik karena asumsi-asumsi tentang peran Negara yang dominan dalam analisis politik luar negeri dewasa ini digugat oleh pendekatan lain seperti liberalisme, analisis politik luar negeri, konstruktivisme sampai pada masalah etik dalam politik luar negeri. Diperkenalkannya berbagai perspektif ini diharapkan akan memperkaya wawasan dan cara kita untuk menganalisis dan memahami keputusan politik luar negeri dan bagaimana kita dapat berperan dalam proses itu.

Buku yang hadir di depan Anda ini adalah buah karya hasil kajian yang cukup lama karena prosesnya berjalan bersama waktu penulis memberi kuliah-kuliah di berbagai universitas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tepatnya ketertarikan penulis pada Analisis dan Teori Politik Luar Negeri dimulai semenjak tahun 1991, dua tahun setelah penulis memulai karir sebagai dosen. Pada tahun itu, artikel penulis tentang *Decision-Making Theories* dalam Politik Luar Negeri muncul dalam *Jurnal Ilmu Politik*, satu-satunya jurnal Ilmu Politik pada saat itu.

Penulis beruntung sejak tahun itu sampai sekarang, pengetahuan penulis terus diasah dengan berbagai bacaan dan perdebatan dengan mahasiswa dan kolega di universitas dan di berbagai tempat seminar. Banyak sekali yang telah berubah dalam kajian politik luar negeri. Dulu orang hanya mengenal analisis faktor-faktor dalam negeri untuk menjelaskan keputusan yang diambil oleh pemerintah suatu negara. Sekarang faktor itu sangat kompleks, tidak terbatas pada aktor dalam negeri seperti pemerintah dan partai-partai tetapi berbagai aktor non-negara di dalam maupun di luar negeri.

Karena itulah penulis berutang budi kepada banyak orang yang, baik secara langsung maupun tidak, telah mendorong penulis untuk menyelesaikan buku ini. *Alhamdulillah*, dengan bantuan mereka dan dengan rahmat yang diberikan oleh Yang Mahakuasa, buku ini bisa diselesaikan juga. Pertama kali, tentu saja penulis berterimakasih kepada para mahasiswa dan kolega, baik di Universitas Jember maupun di tempat lain yang selalu bertanya dan mendebat berbagai pandangan penulis. Mereka juga selalu mendorong penulis untuk melahirkan buku-buku yang mudah mereka pahami, tidak terlalu abstrak tapi membumi sehingga bisa membantu mereka menganalisis masalah-masalah luar negeri. Ketika penulis melahirkan buku pertama, *Pengantar Ilmu Politik*, mereka selalu bertanya, kenapa tidak dari dulu membuat hidup mereka menjadi lebih mudah.

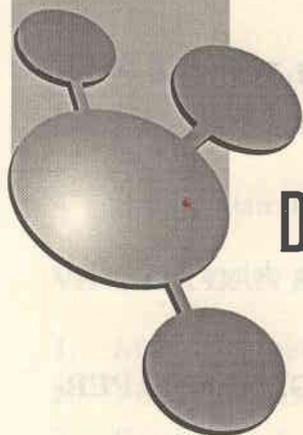
Penulis juga berterimakasih kepada keluarga penulis, istri Yuyun Rahim dan anak-anak Fabrobi Fazlur Ridha, Fabsya Farazzahra dan Fabasyari Faustari Hara yang selalu heran melihat ayah mereka duduk terpaku di belakang komputer dan bertanya-tanya kapan pergi ke luar makan dan tamasya bersama ke pantai pasir putih Malikan. Terimakasih atas waktu dan kesabaran mereka. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada teman dekat tapi jauh di Australia, saudara Grayson J. Llyod yang selalu mendorong tulisan hasil karya saya.

Tentu saja akhirnya *last but not least*, tidak lupa berterimakasih kepada Sdr Nurani Soyomukti, partner diskusi, partner kerja dan partner suka-duka yang selalu mendorong bahkan membantu langsung mengedit tulisan-tulisan saya agar lebih layak baca. Ma-klumlah Nurani adalah penulis produktif dan berpengalaman. Dengan bantuan beliau, bahasa buku ini lebih mudah dan proses penerbitan buku ini menjadi lebih cepat dan lancar. Semoga buku ini dapat memperkaya kajian hubungan internasional di Indonesia.

Jember, 16 Nopember 2010

10 Dzulhijah 1431

Abubakar Eby Hara



DAFTAR ISI

Kata Pengantar — 5

I PENDAHULUAN — 13

1. Beberapa Terminologi APLN — 15
2. Perdebatan Metodologi dalam HI dan APLN — 17
3. Kritik terhadap “*Unitary State Actor*” — 23
4. Kemunculan APLN: Tiga Generasi — 26
5. Pembagian Bab — 31

II POLITIK LUAR NEGERI DALAM PANDANGAN REALISME — 34

1. Asumsi-asumsi Utama Realisme — 35
2. Realisme Klasik dan PLN — 39
3. Neo-Realisme dan PLN — 43
4. Contoh Kasus Hubungan Indonesia-Malaysia — 54

III ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI DALAM PANDANGAN LIBERALISME — 60

1. Prinsip Dasar Liberalisme — 61
2. Liberalisme dan PLN — 65
3. Kasus Hubungan Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Liberalisme — 72

IV ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI GENERASI PERTAMA — 79

1. Faktor-faktor Lingkungan dalam APLN — 80
2. Teori Internal-Eksternal Setting dari Snyder, Bruck dan Sapin — 84
3. Pre-Teori dan Teori Politik Luar Negeri dari Rosenau — 89
4. Model-model Pembuatan Keputusan Graham T. Allison — 91
5. Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Pandangan APLN Generasi Pertama — 100

V ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI GENERASI KEDUA — 104

1. Kelanjutan Konsep Pengaruh Lingkungan, Idiosinkretik dan Sistem Kepercayaan — 105
2. Kelanjutan Model Peranan Organisasi dan Birokrasi — 107
3. Hubungan Indonesia-Malaysia dalam Pandangan APLN Generasi II — 111

VI KONSTRUKTIVISME DAN GENERASI KETIGA APLN — 114

1. Pengertian dasar Konstruktivisme — 116
2. Macam-macam Aliran Konstruktivis — 122
3. Perkembangan Konstruktivis dan APLN — 137

4. Beberapa Contoh Kasus APLN Konstruktivis — 144
5. Hubungan Malaysia dan Indonesia dari Perspektif Konstruktivis — 151
4. Kesimpulan: Basis Hubungan Baru — 173

VII ETIK DAN POLITIK LUAR NEGERI — 177

1. Makna Perspektif Etik dalam HI — 179
2. PLN Etik Sebagai Tujuan dan Sarana — 188
3. Dunia yang Lebih Damai: Ke Arah PLN yang Etik? — 197
4. Etik dalam Hubungan Indonesia-Malaysia — 200
5. Kesimpulan: Menuju Etik Hubungan Kosmopolitanisme? — 209

VIII KESIMPULAN: MEMILIH DI ANTARA BERBAGAI PENDEKATAN — 214

1. Langkah Awal Memilih Pendekatan — 215
2. Memastikan Pilihan Kerangka Teoritik — 217

DAFTAR PUSTAKA — 223

Indeks — 233

Tentang Penulis — 241



PENDAHULUAN

Sulit membuat definisi yang lengkap tentang politik luar negeri. Tetapi secara umum, bisa dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Politik Luar Negeri (selanjutnya disingkat PLN) menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. PLN itu bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek (K. J. Holsti, 1983: 97).

Seperti Holsti, definisi yang luas diberikan oleh Christopher Hill yang mengatakan PLN sebagai 'jumlah hubungan luar resmi yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya negara) dalam hubungan internasional' (Hill, 2003: 3). Definisi yang dianggap klasik dan detail diberikan oleh Walter Carlsnaes, yaitu 'tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan aktor (baik pemerintah maupun non-pemerintah) yang berada luar di wilayah teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen

dan/atau arah yang dinyatakan secara ekplisit, dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara/komunitas yang berdaulat' (Carlsnaes, 2002: 335).

Berdasarkan definisi-definisi ini, fokus utama kajian PLN adalah untuk memperhatikan intensi (maksud), pernyataan dan tindakan aktor yang diarahkan pada dunia eksternal dan respon dari aktor-aktor lain terhadap intensi, pernyataan dan tindakan ini (Gerner, 1995: 18). Tidak seperti politik dalam negeri, para pembuat keputusan PLN biasanya mempunyai sedikit kontrol terhadap situasi, dan pengetahuan mereka juga sangat terbatas. PLN juga mengimplikasikan tiadanya tindakan yang diambil sebagai bagian dari PLN (MacDonald, Patman, & Mason-Parker, 2007: 1). Misalnya negara-negara Barat tidak mengambil tindakan terhadap Israel tetapi sangat *concern* dengan kekerasan yang dilakukan oleh negara-negara Arab.

Definisi-definisi di atas, terutama Hill, menunjukkan juga bahwa berbagai aktor selain negara seperti *transnational corporations* (TNCs), gereja, orang-orang tak berpunya dan terusir, gerakan-gerakan jihad, *non-governmental organizations* (NGOs), para pemberontak dan organisasi internasional, seperti Uni Eropa, semua bisa berperan dalam PLN.

Sebelum membahas masalah Analisa Politik Luar Negeri (selanjutnya disingkat APLN) lebih lanjut, dalam bab pendahuluan ini akan dijelaskan terlebih dahulu ringkasan asal-usul, definisi dan perkembangan teoritik APLN. Penjelasan akan dimulai dari posisi, definisi-definisi konsep APLN dalam disiplin Hubungan Internasional (HI). Lalu untuk memudahkan, akan dilihat posisi metodologis APLN dalam perdebatan keilmuan HI. Setelah itu, akan dilihat bagaimana kritik APLN terhadap realisme, dan kemunculan kritik mulai dari generasi pertama studi PLN, apa yang dimaksud dengan generasi pertama dan apa fokus kajiannya. Penjelasan yang sama akan dilakukan terhadap generasi kedua dan ketiga.



POLITIK LUAR NEGERI DALAM PANDANGAN REALISME

Sebelum membahas APLN lebih lanjut, ada baiknya dibahas terlebih dahulu secara agak detail bagaimana pandangan realisme tentang politik luar negeri. Orang mungkin akan mempertanyakan apakah ada TPLN dari kalangan realis karena fokus realisme sebetulnya lebih kepada hakikat *power* dan struktur politik internasional yang bersifat anarkis dan bagi kalangan neo-realis sistem politik internasional ini menentukan perilaku negara-negara. Para realis memperlakukan *state* sebagai aktor yang rasional yaitu mengikuti prinsip mengejar, melindungi dan mempertahankan kepentingan nasionalnya yang didefinisikan sebagai kekuasaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasannya di dunia internasional. Disebut sesuai dengan kemampuannya, karena perilaku *state* dipengaruhi oleh keseluruhan distribusi kekuasaan dalam sistem internasional, yang memiliki skop dan aturan-aturannya sendiri (Holsti, 1983: 97). Berdasarkan hal ini, tidak perlu ada analisis tentang PLN negara-negara itu karena ia otomatis sudah dijelaskan oleh asumsi *power* dan juga anarki dalam dunia internasional, atau dengan kata lain, negara tidak punya pilihan dalam menentukan PLN.

Walaupun demikian, sekecil apa pun peran negara-negara, mereka tetap melakukan dan memutuskan suatu kebijakan untuk memaksimalkan kepentingan nasional mereka. Karena itu, kita tetap perlu membahas pilihan-pilihan negara itu walau terbatas pada menu yang memang sudah disediakan dan semacam sudah tertulis dalam struktur internasional. Dalam bab ini, kita mengkaji asumsi-asumsi dasar realisme dalam rangka membandingkannya nanti dengan APLN yang muncul sebagai kritik terhadap realisme. Realisme juga merupakan suatu perspektif yang tidak seragam. Terdapat dua *mainstream* utama dalam realisme yang mempengaruhi pandangan mereka tentang PLN. Aliran pertama sering disebut realisme klasik dan yang kedua disebut neo-realisme. Bab ini pertama akan membahas gambaran umum realisme, kemudian akan dijelaskan pandangan realisme klasik terhadap politik luar negeri. Setelah itu, akan dibincangkan pandangan neo-realis terhadap PLN.

I. ASUMSI-ASUMSI UTAMA REALISME

Ada tiga asumsi utama realisme yang sering dikelompokkan dalam 3S: *statism, survival, self-helps* (Dunne and Schmidt, 2001: 155-56). *State* adalah aktor utama dalam HI yang anarkis. Asumsi ini berasal dari kenyataan bahwa untuk *survive* dan mencapai level subsisten manusia perlu hidup bersatu berdasarkan suatu solidaritas kelompok. Kohesi dalam grup ini juga berpotensi untuk berkonflik dengan kelompok-kelompok lain. *State* merupakan pengelompokan manusia (*groupism*) yang paling penting dewasa ini, dan sumber kohesi *in-group* yang paling kuat adalah nasionalisme (Wohlforth, 2008: 32).

Sementara itu, aktor-aktor yang lain dinilai kurang penting. Negara sebagai satu komunitas politik yang independen mempunyai kedaulatan terhadap suatu wilayah dalam dunia yang anarkis. Perlu dijelaskan bahwa anarki bagi realis bukan keadaan benar-benar *chaos* dan tidak ada aturan, tetapi ketiadaan kekuasaan sentral. Berbeda dengan struktur organisasi dalam politik domestik yang hirarkis, dalam hubungan internasional, struktur dasarnya adalah anarkis di

pemimpin di berbagai forum seperti di dunia Islam dan juga di dunia ketiga dalam melawan hegemoni Barat.

Sementara Indonesia agaknya tidak berhasil mengukuhkan kontinuitas kekuatan dan artinya juga kepemimpinan aktif di kawasan yang membuat dua negara tadi merasakan kehadiran Indonesia. Tidak heran, mereka mengubah sikap dan pandangan terhadap Indonesia. Tiadanya ketidaksinambungan dalam politik luar negeri dari satu presiden ke presiden adalah salah satu sebab postur diplomasi yang lemah. Bahkan ada kecenderungan satu pemerintahan ingin berbeda dari pendahulunya. Kita ingat dulu ada politik poros-porosan Cina-India-Indonesia dan sekarang doktrin seribu kawan dan tidak ada musuh. Ini berbeda dengan Malaysia yang berhasil mentransformasikan negeri itu menjadi negara maju. Konsep-konsep Mahathir seperti terencana perlahan tapi pasti tidak hanya membuat dirinya, tetapi juga Malaysia, mengambil alih peran Indonesia sebagai pemimpin dunia ketiga dan negara-negara Islam.

Politik luar negeri terakhir yang masih terkonseptual, terencana dan berkesinambungan dengan baik adalah pada masa Soeharto. Tidak satu pun dari presiden setelah itu yang memikirkan satu postur diplomasi untuk meningkatkan wibawa Indonesia. Mungkin karena tidak punya konsep atau mungkin juga karena memang tak sempat memikirkannya. Pengabaian ini sangat merugikan, karena politik luar negeri seperti kehilangan ruh yang kuat. Kebanyakan mereka menganggap politik luar negeri hanya pelengkap dari politik dalam negeri, *toh* tidak mempengaruhi suara pemilu. Mereka tidak menganggap perlu merumuskan secara matang politik luar negeri.

Kebijakan-kebijakan diambil secara sporadis dan *ad hoc* tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Ia tak didirikan di atas pandangan realisme politik luar negeri yang membuat masyarakat bangga. Lepasnya Timor Timur, kalah di Sipadan Ligitan, tidak kunjung selesaikan perjanjian ekstradisi dengan Singapura menunjukkan bagaimana Indonesia telah didikte oleh dunia internasional, bukan menjadi pemain aktif dan berinisiatif seperti yang dituntut oleh prinsip bebas aktif. Negara-negara tetangga dengan pintar memanfaatkan kelemahan ini, mendikte Indonesia



ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI DALAM PANDANGAN LIBERALISME

Liberalisme dalam hubungan internasional kembali mendapatkan perhatian besar setelah berakhirnya perang dingin pada tahun 1989. Baik pengamat maupun para pembuat keputusan melihat adanya kesempatan bagi politik luar negeri yang lebih bersahabat dari negara-negara di dunia setelah runtuhnya Uni Soviet. Harapan itu dicerminkan dari fokus kebijakan luar negeri Amerika yang lebih memperhatikan masalah-masalah penyebaran HAM dan demokrasi. Tema-tema tentang idealisme, seperti *collective security* dan harapan bagi dunia yang damai lewat demokrasi muncul kembali. Bersatunya negara-negara di bawah PBB untuk melawan invasi Irak terhadap Kuwait pada tahun 1990 memberikan harapan tentang optimisme ini dan membuktikan bahwa negara-negara tidak mentolelir intervensi terhadap negara lain sebagaimana disebutkan dalam piagam PBB.

Para pengamat juga memberikan perhatian lebih kepada liberalisme.*Tesis yang paling menarik adalah dari Francis Fukuyama (Fukuyama, 2006) yang mengatakan bahwa sejarah dunia telah berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal dan kapitalisme. Ia mengatakan bahwa semua negara dalam satu dan lain hal

bergerak ke arah dua sistem ideologi lain seperti komunisme dan otoritarianisme. Tesis ini diikuti pula dengan asumsi supremasi sistem demokrasi dalam kaitan dengan perang. Tesis *democratic peace* menyebutkan bahwa sesama negara demokratis tidak terjadi perang.

Dalam bab ini akan diuraikan apa itu liberalisme dan sejauh mana ia memang memberikan pengaruh yang cukup berkesan terhadap PLN suatu negara. Pada bagian pertama akan dijelaskan apa itu liberalisme. Kemudian bagian kedua akan ditinjau sejauh mana liberalisme dapat menjelaskan PLN suatu negara.

I. PRINSIP DASAR LIBERALISME

Liberalisme merupakan ideologi yang mempunyai pengaruh besar di dunia dan yang dibincangkan di sini berasal dari pemikiran Barat. Ia menjadi landasan bagi demokrasi dan sistem kapitalisme industri yang kini berkembang di dunia. Prinsip-prinsip pemikiran rasional ilmiah, pemerintahan yang terbatas, pemikiran tentang kebebasan individu dan posisi individu yang bebas dari campur tangan negara dianggap sesuai dengan sistem demokrasi dan kapitalisme. Kebebasan politik, kompetisi individu dalam masyarakat sipil dan sistem kapitalisme pasar adalah yang terbaik dalam menopang kesejahteraan melalui alokasi sumber-sumber yang terbatas secara efisien di masyarakat (Burchill, 2009: 3).

Ada tiga macam komitmen terhadap hak-hak yang menjadi fondasi liberalisme (M. W. Doyle, 2008: 50). Yang pertama disebut 'kebebasan negatif' yang merupakan kebebasan dari penguasa sewenang-wenang (*arbitraty*). Ini meliputi kebebasan menentukan yang baik dan buruk, kebebasan pers dan kebebasan berbicara, kesederajatan hukum, kebebasan memiliki dan hak milik. Yang kedua adalah hak untuk melindungi dan memperjuangkan kesempatan bagi kebebasan atau disebut juga 'kebebasan positif'. Ini meliputi hak sosial dan ekonomi, kesamaan kesempatan dalam pendidikan dan hak-hak terhadap sistem kesehatan dan mendapat pekerjaan. Hak-hak ini penting untuk bisa mengekspresikan diri

kedaulatan Indonesia. SBY yang mencoba menjaga hubungan baik dengan Malaysia sering dianggap oleh media sebagai terlalu lemah dan tidak tegas terhadap Malaysia.

Media pun berada di belakang protes-protes anti-Malaysia dengan melaporkan pandangan-pandangan negatif terhadap Malaysia. *Kompas*, harian nasional paling terkemuka, pun yang biasanya netral dan obyektif dalam pemberitaan melaporkan semua berita *negative* tentang Malaysia dan meminggirkan pemerintahan SBY. Mereka menampilkan gambar-gambar protes NGO termasuk pembakaran bendera dan selalu mengambil pandangan pakar yang mengkritik lemahnya polisi SBY dalam menghadapi Malaysia.

Media lain, seperti MetroTV dan Media Indonesia yang dimiliki Surya Paloh, juga merupakan media yang sangat giat memojokkan Malaysia dan mengecam lemahnya kebijakan SBY terhadap Malaysia. Banyak orang masih melihat Surya Paloh memiliki ambisi untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia. Sebelumnya, ia adalah anggota partai Golkar dan bertanding untuk menjadi calon Partai Golkar dalam pemilihan presiden tahun 2009, namun ia kalah. Kemudian ia membentuk partai sendiri terpisah dari Golkar dan terus berminat untuk bertanding dalam pemilu 2014. Maka dapat dipahami bahwa media-media ini kadang-kadang secara sistematis mendeskreditkan kelemahan pemerintahan sekarang untuk kepentingan pemilu yang akan datang.

Saluran televisi yang juga mengungkapkan perasaan anti-Malaysia adalah TV One. Banyak orang juga melihat TV yang dikuasai orang Golkar ini memiliki kepentingan untuk menunjukkan kelemahan politik luar negeri terhadap Malaysia. Dalam beberapa kesempatan, TV One selalu menunjukkan kelemahan SBY sebagai presiden termasuk dengan menggunakan isu hubungan dengan Malaysia. Mereka terutama sekali ingin menunjukkan bahwa SBY adalah presiden yang lemah dan tidak berhasil memimpin Indonesia. TV One juga meramaikan nasionalisme bagi mencari pengaruh di samping mau menggugat kepemimpinan SBY.

Di tengah gelombang protes anti-Malaysia yang diramaikan media, sebenarnya masih ada komponen masyarakat yang melihat masalah dengan wajar. Pandangan mereka tentu saja tidak populer

di tengah arus nasionalisme anti-Malaysia yang kuat. Kelompok ini antara lain diwakili oleh NU (Nahdatul Ulama), organisasi Islam terbesar di Indonesia yang menegaskan bahwa hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Malaysia adalah terlalu kuat untuk dirusakkan oleh kepentingan ego individu. Mereka paham bahwa kalau terjadi konflik, yang rugi tentu rakyat di kedua negara. Dalam sebuah laporan kantor berita Malaysia, *Bernama*, ketua Dewan Syura NU Pusat, Masdar Farid Mas'udi mengatakan, "Kalau berlaku konflik, yang akan rugi kita sendiri. Orang lain atau pihak-pihak yang tidak suka dengan persaudaraan kita akan mengambil manfaat dari itu." Ia melanjutkan, "Walaupun pihak-pihak berkenaan itu pada awalnya tak mempunyai niat sedemikian, namun jika Indonesia dan Malaysia menjadi lemah, mereka akan ambil manfaatnya," katanya kepada *Bernama* di Jakarta.

Laporan-laporan media ini sering dangkal, perspektif laporan seringkali sepihak. Seolah-olah apa yang berlaku antara Malaysia dan Indonesia lebih buruk daripada bencana tsunami dan bagaikan Indonesia sudah ditawan musuh. Sebenarnya, terlalu banyak persoalan di balik isu menyangkut anti-Malaysia. Siapa yang menjadi dalang, siapa yang merancang dan apa motif mereka adalah bermacam-macam.

Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa para analis liberal memandang hubungan Indonesia-Malaysia pada dasarnya bisa dilakukan dengan baik dan penuh harmoni. Tetapi dalam perjalanannya, banyak masalah yang timbul karena hubungan melibatkan berbagai pihak, kelompok dan kepentingan di dalam negeri. Mereka melihat ini sebagai bagian dari *social ill* yang mesti diatasi agar hubungan kedua negara dapat berjalan dengan baik. Dalam pandangan mereka juga, masih banyak hal lain dan saling ketergantungan di antara kedua negara yang dapat mencegah menguatnya sikap anti dan benci terhadap satu sama lain.[]



ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI GENERASI PERTAMA

A PLN berkembang sejak 1950-an dan menurut Hudson (Hudson, 2008: 11-29), ia mempunyai tiga tema utama. *Pertama*, analisis yang memfokuskan pada pembuatan keputusan PLN yang diinspirasi oleh tulisan Snyder, Bruck dan Sapin pada tahun 1950-an, kemudian dipengaruhi oleh tulisan tentang politik birokrasi dan organisasi pada tahun 1960-an-1970-an yang dapat kita temui pada tulisan-tulisan Allison dan Halperin. *Kedua*, analisis yang memfokuskan pada dimensi psikologi analisis PLN yang dipengaruhi oleh tulisan Kenneth Boulding, dan Harold dan Margaret Sprout pada tahun 1960-an, kemudian dilanjutkan oleh Alexander George dan Michael Brecher pada 1960-an dan Irving Janis pada 1970-an. *Ketiga*, ada perkembangan PLN perbandingan yang dipengaruhi oleh tulisan Jim Rosenau pada tahun 1960-an. Rosenau memelopori upaya untuk membangun teori level menengah (*middle-range theory*), yaitu teori yang tidak berupaya menjelaskan semua PLN secara umum tetapi hanya PLN beberapa jenis negara atau PLN dalam situasi khusus seperti semasa krisis.

Pada bab ini hanya dibahas empat tulisan utama dari generasi pertama APLN. Keempat tulisan ini yaitu dari Sprout, Snyder dkk, Rosenau dan Allison dipilih karena dipandang sebagai perintis utama kajian PLN dan sampai sekarang masih sering digunakan oleh para analis, akademisi dan mahasiswa dalam memahami kebijakan luar negeri suatu negara. Seperti dikatakan di muka, berbeda dengan realisme, para analis ini mencoba mencari sebab lahirnya keputusan PLN suatu negara dengan mencari dan melihat individu-individu kunci dalam kelompok eksekutif yang memutuskan atau yang disebut juga 'unit-unit keputusan' (*decision units*). Mereka mencoba memahami imej dan sikap para pembuat keputusan dan ciri-ciri organisasi dari unit-unit keputusan sebagai hal-hal utama dalam proses pembuatan keputusan PLN.

Yang mendasari pandangan mereka sebenarnya adalah bahwa faktor-faktor lingkungan yang mempunyai istilah berbeda untuk tiap penulis (Sprout menyebutnya *milieu* atau *environment*, sedangkan Snyder dkk menyebutnya *setting*) mempunyai pengaruh tersendiri walaupun mungkin tidak konsisten dan tidak langsung pada keputusan-keputusan PLN yang akan diambil oleh unit-unit keputusan tadi. Faktor-faktor lingkungan ini berperanan sejauh mereka mempengaruhi atau dimediasi oleh persepsi-persepsi dan sikap para pembuat keputusan yang berkaitan (Gold, 1978: 569).

I. FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN DALAM APLN

Cikal bakal APLN dapat ditelusuri dari tulisan Harold dan Margaret Sprout pada tahun 1957. Pasangan suami-istri ini berbicara tentang pentingnya faktor-faktor *environment* atau lingkungan atau *setting* atau sering juga disebut *milieu* dalam melihat keputusan yang diambil dan dilaksanakan oleh suatu negara (Sprout & Sprout, 1957: 49). Milieu ini bisa berupa posisi geografis, perkembangan sejarah, kondisi alam dan sumber alam. Lebih umum lagi, ia bisa meliputi obyek yang dapat dilihat, lingkungan manusia atau bukan,

Mungkin karena mereka ini bukan orang besar, seperti para anggota Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka tidak mendapatkan pemberitaan besar. Tidak ada yang menolong mereka dengan gegap gempita. Intervensi pemerintah melalui Kedutaan Besar mungkin lambat karena mereka mungkin tidak mendapatkan informasi atau, walaupun ada informasi, kasusnya memang tidak bisa mereka bantu. Para staf kedubes ini sangat paham apa yang dapat mereka lakukan dan intervensi dalam yuridiksi kedaulatan negara lain. Jadi, mereka tidak sembarang marah dan melakukan tindakan yang tergesa-gesa.

Melihat kasus ini, protes masyarakat ternyata sangat selektif dan mereka sangat mudah terprovokasi oleh pemberitaan media yang sensasional. Kalaulah masyarakat dan media mempunyai tujuan yang serius dalam protes-protes itu, mereka harus mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah melakukan hal yang terbaik dalam *dealing* dengan Malaysia. Tetapi proses itu segera reda setelah dilakukan beberapa respon baik dari Malaysia maupun pemerintah Indonesia. Respon yang dilakukan juga sporadik dan ingin memuaskan para pemrotes saja.

Ini menunjukkan bahwa para pemrotes itu tidak memahami akar permasalahan yang kompleks dalam hubungan kedua negara karena menyangkut sistem hukum di kedua negara. Mereka hanya melihat eksekusi atau akibat dari akar persoalan yang dalam itu. Akar persoalannya adalah hubungan kedua Negara lebih dalam karena interaksi yang makin intensif dalam era global ini. Interaksi itu bukan saja berkaitan dengan para pekerja tetapi juga pelaku ekonomi yang berkaitan dengan investasi dan perdagangan. Arus masuk keluarnya pekerja Indonesia saja tidak dapat diselesaikan sampai sekarang, sehingga menimbulkan berbagai masalah *human trafficking*, pendatang ilegal dan lain-lain persoalan lintas batas. Belum lagi kondisi dan hak-hak pekerja Indonesia di Malaysia yang sangat memprihatinkan. Semua ini adalah akar masalah dalam hubungan kedua negara yang tidak disentuh oleh para pemrotes; mereka hanya melihat eksekusi dari persoalan ini.

Karena itulah, para pemrotes dan juga media belum menjadi pemain utama dalam perumusan kebijakan LN Indonesia terhadap

Malaysia. Mereka tidak berkembang menjadi kelompok kepentingan pemaksa atau *pressure group* karena sifatnya yang sangat temporer tergantung kepada siapa yang meniuip-niup kemarahan mereka. Kelompok pemrotes ini akan menjadi kuat dan berpengaruh kalau mereka, misalnya, menjadi atau setidaknya berada di belakang sebuah lobi Indonesia yang memperjuangkan kepentingan Indonesia di Malaysia. Berbeda dengan orang keturunan Yahudi di Amerika yang jumlahnya sangat sedikit tetapi bisa membuat satu kekuatan lobi di sana, orang keturunan Indonesia di Malaysia tidak dapat melakukan hal ini. Kenapa mereka tidak melakukan lobi ini adalah pertanyaan menarik yang harus dikaji lebih lanjut.

Untuk alasan di atas, kita dapat mengatakan bahwa aktor-aktor utama dalam hubungan Indonesia-Malaysia adalah masih adanya kelompok-kelompok tradisional dalam PLN, yaitu kementerian luar negeri, pertahanan dan kelompok-kelompok bisnis. Tidak seperti para pemrotes dan anjuran-anjuran kelompok untuk memerangi Malaysia, kelompok-kelompok tradisional itu mempunyai kepentingan untuk menjaga hubungan yang harmonis bahkan mungkin tanpa gejolak. Pihak Kementerian Luar Negeri ingin melihat terus tumbuhnya solidaritas ASEAN dan terciptanya harmoni di antara negara-negara ASEAN sehingga mengambil jalan aman dalam hubungan dengan Malaysia.

Dalam hubungan dengan Malaysia, kelompok militer pun tidak melihat keuntungan konflik militer, lagi pula kekuatan militer Indonesia sudah ketinggalan dari Malaysia. Mereka juga sekarang harus tunduk kepada kehendak pemerintahan sipil. Kelompok-kelompok bisnis di tanah air maupun di Malaysia selalu menginginkan suasana kondusif bagi mereka untuk berniaga dan melakukan investasi. Dengan banyak pertimbangan ini, Presiden SBY yang memang selalu menimbang masak-masak setiap masalah, menganggap pilihan permusuhan dan konfrontasi tiada gunanya.

Dalam model analisis politik birokrasi Allison dengan demikian keputusan Indonesia untuk terus melakukan hubungan diplomatik dan dialog adalah hasil perpaduan dari berbagai kepentingan politik dan bisnis yang relevan dalam pembuatan keputusan LN.[]



ANALISIS POLITIK LUAR NEGERI GENERASI KEDUA

A PLN generasi kedua merupakan kelanjutan dari teori-teori yang sudah dirintis oleh para pendahulu mereka di generasi pertama. Mereka melakukan beberapa modifikasi dan penyempurnaan terhadap model, konsep dan teori sebelumnya dan juga menerapkan model-model yang dimodifikasi ini dalam menjelaskan kasus-kasus. Satu hal yang membedakan generasi kedua dengan generasi pertama adalah generasi baru ini menekankan pada upaya menemukan teori-teori positivistik dan saintifik seperti yang diinginkan oleh Rosenau dengan membandingkan faktor yang paling berpengaruh dalam perumusan politik luar negeri beberapa negara. Karena itu pula pendekatan generasi pertama ini sering disebut *Comparative Foreign Policy (CFP)*. Mereka ingin mengembangkan *middle range theories* yang dapat menjelaskan kasus-kasus politik luar negeri di berbagai atau lintas negara dan dalam waktu yang berbeda.

Perkembangan analisis pada generasi kedua ini secara umum masih mengikuti teori-teori dan model-model yang telah dirintis oleh para analis di generasi pertama. Kajian mereka dapat dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu *pertama*, pengembangan

pengaruh lingkungan pada politik luar negeri, yang juga bisa dikaitkan dengan pengembangan kajian Rosenau dengan penekanan pada variabel individual dan kognitif, dan *kedua*, berbagai pengembangan model organisasi dan birokratik pembuatan keputusan. Namun, harus diingat bahwa pembagian itu tidak kaku karena mereka bersinggungan satu dengan yang lain. Faktor kognitif, misalnya, yang banyak dikembangkan dalam generasi kedua berkaitan baik dengan faktor lingkungan yang dipahami oleh Sprout maupun faktor psikologi dari individu dan kelompok seperti yang dimaksudkan oleh Rosenau. Pembagian ini hanya sekadar untuk memudahkan karena dalam analisisnya, generasi kedua sering mencoba menggabungkan atau mengambil bagian-bagian dari tiga arus utama pemikiran, teori dan model APLN ini.

I. KELANJUTAN KONSEP PENGARUH LINGKUNGAN, IDIOSINKRETIK DAN SISTEM KEPERCAYAAN

Seperti dikatakan Sprout, faktor lingkungan bisa berupa nilai-nilai di masyarakat, karakter nasional, budaya politik dan tradisi sejarah sebuah bangsa; bisa juga ciri-ciri struktural suatu bangsa, seperti tingkat industrialisasi dan bentuk pemerintahan, dan juga isu-isu mutakhir pada saat itu. Semua atau sebagian faktor ini mempengaruhi pikiran para pembuat keputusan PLN. Semua faktor ini, menurut Sprout, menjadi penting dan bisa mempunyai pengaruh sepanjang menjadi perhatian para pembuat keputusan. Dalam kaitan ini, menjadi sangat penting mengkaji apa yang disebut Sprout sebagai lingkungan psikologis para pembuat keputusan yang berupa persepsi, interpretasi, nilai-nilai, emosi, sikap, sistem kepercayaan dan bahkan sikap personal idiosinkrasi yang disebut oleh Rosenau yang ada pada individu atau aktor-aktor utama pembuat keputusan.

Beberapa konsep psikologis berhasil dikembangkan lebih lanjut oleh generasi kedua ini dalam kaitan dengan sikap personaliti

Berdasarkan banyak kasus pembuatan keputusan LN, Hermann dan Hermann (M. G. Hermann & Hermann, 1989: 363-364) merumuskan dari berbagai pertarungan aktor domestik itu beberapa unit keputusan yang muncul dalam kasus-kasus tersebut. Kalau dalam pertarungan sesama aktor domestik yang relevan hasilnya menunjukkan peranan seorang pemimpin yang ternyata dominan, seperti disebut di muka, maka itu disebut *predominan leader*. Kemudian kalau yang unggul adalah satu kelompok, ia menyebutnya kelompok tunggal atau *single group*; dan jikalau tidak ada yang dominan dalam pembuatan keputusan, ia menyebutnya aktor otonomi yang banyak (*multiple autonomous actors*).

Jadi, lebih jauh dari generasi pertama, mereka mencoba membuat generalisasi yang akan lebih memudahkan dalam analisis politik luar negeri. Mereka ingin menjelaskan kapan dan dalam situasi apa politik birokrasi—pertarungan banyak aktor yang dominan—dan kapan *single actor* ataupun *single group* menjadi dominan.

Dikaitkan dengan kasus hubungan Indonesia-Malaysia dewasa ini, agaknya *single group* masih dominan dalam perumusan kebijakan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ini terutama berkaitan dengan kelemahan pribadi Yudhono yang tidak berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan cepat, sehingga memerlukan banyak masukan dari staf-stafnya. Keputusan pada masa kepresidenannya, karena itu, lebih bisa dijelaskan dalam kerangka unit keputusan *single group*. Kekuatan-kekuatan dalam pembuatan keputusan PLN terhadap Malaysia seperti diungkapkan di atas bersifat homogeni dan memiliki kepentingan yang sama dan karena itu mereka dapat disebut sebagai *single group*. Anggota *single group* ini terpisah dan tersebar, bisa individu-individu, kelompok-kelompok atau koalisi. Pada satu saat, mereka bisa bersama-sama mendukung satu keputusan PLN. Tetapi secara sendiri-sendiri, mereka tidak mampu memutuskan atau memaksakan kehendak pada yang lain.

Ini berbeda dengan keadaan pada masa Presiden Soekarno, misalnya, atau kalau di Malaysia, semasa PM Mahathir Mohamad. Mereka termasuk pemimpin yang dominan sehingga unit

keputusan bisa disebut sebagai *single actor*. Pada mereka terdapat kepribadian dan ideologi yang kuat di mana orang-orang lain harus menyesuaikan untuk mendapatkan simpati darinya atau untuk mendapatkan tempat dalam pemerintahannya. Mereka juga tidak segan-segan untuk menyingkirkan mereka yang tidak sesuai dengan pandangan politiknya, seperti yang dilakukan Mahathir terhadap wakilnya Anwar Ibrahim.[]

wacana yang ditampilkan seperti 'Look East Policy', 'New Asia', 'Smart Partnership', 'Malaysia Boleh', dll. Selain itu, melalui proses sekuritisasi oleh pejabat-pejabat di sana yang sepenuhnya didukung oleh media yang dikuasai negara, gambaran tentang Indonesia sebagai saudara tua telah berganti menjadi saudara tua yang pikun karena tidak bisa mengurus ekonomi, miskin dan penuh masalah sosial.

Komplain terhadap Malaysia yang berangkat dari imajinasi dan ekspektasi berdasarkan pada pemahaman intersubjektif lama tentang hubungan kedua negara mestinya mulai ditinggalkan. Pemahaman itu seperti kerinduan akan *good old days* yang tidak mungkin lagi terjadi karena perubahan politik dan ekonomi yang begitu cepat di kedua negara. Masyarakat dan media hendaknya mulai membuka mata karena Malaysia sudah lain dari yang dipersepsikan dulu. Walaupun mereka masih sering memutar lagu P. Ramlee tapi *mindset* mereka adalah *mindset* global. Wacana yang mesti dihidupkan adalah wacana persaingan global, transparansi dan *good governance*.

Dalam struktur peran di dunia internasional sekarang, peran yang dapat dimainkan negara-negara ini adalah peran yang bersifat rivalitas. Praktik kebijakan yang dilakukan Malaysia adalah praktik untuk mampu bersaing di kancah global, suatu hal yang sebetulnya juga sedang dipraktikkan Indonesia di lingkungan internasionalnya. Rivalitas itu dalam hubungan negara yang berdaulat tidak mengenal istilah rivalitas dalam keserumpunan.

Hubungan kedua negara dengan demikian memerlukan pengaturan-pengaturan yang transparan, mengiktui aturan *good governance* dan prinsip-prinsip global lainnya. Ini agaknya dimulai ketika persoalan Sipadan-Ligitan harus diselesaikan dengan mengikuti aturan hukum internasional melalui Mahkamah Internasional. Demikian juga penyelesaian masalah lagu, karya seni dan produk budaya lainnya menjadi relevan hanya dalam konteks intelektual atau *cultural property rights* yang menjadi kesepakatan internasional. Dalam konteks ini, Indonesia juga mestinya mulai berani menekan Malaysia agar lebih transparan dan mengikuti aturan perburuhan internasional dalam kaitan dengan masalah TKI yang banyak dirugikan selama ini.[]

Catatan

1. Kerentananan itu seringkali diperparah oleh rasa khawatir dan frustrasi karena ketidakmampuan untuk melindungi diri. Tetapi dalam sejarahnya, untuk mengatasi ini Indonesia tidak mau meminta bantuan asing melainkan harus mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mengandalkan kekuatan asing akan membuat independensi terombang-ambing dan menjadi permainan kekuatan besar, yang justru akan mempermudah infiltrasi kekuatan asing itu ke bumi Indonesia. Ini tertuang dalam deklarasi politik luar negeri negara ini yaitu bebas dan aktif yang bermakna bahwa Indonesia bebas dalam melakukan pilihan politik internasional tetapi juga aktif mempromosikan perdamaian. Kemudian prinsip ini dirumuskan dalam konsep wawasan nusantara oleh rezim Orde Baru.
2. *Common knowledge concerns actors' beliefs about each other's rationality, strategies, preferences and beliefs, as well as about the state of the external world. This explains how actors overcome indeterminacy and co-ordinate their expectations around particular outcomes. Common knowledge, considered as shared beliefs that orient action, includes norms, rules, institutions, conventions, ideologies, customs and laws. These all constitute 'shared mental models', which means that "with each change in belief, or each change in membership, the cultural forms constituted by common knowledge become literally different"* (Umum diketahui menyangkut keyakinan aktor tentang rasionalitas, strategi, preferensi dan keyakinan satu sama lain, serta tentang keadaan dunia luar. Ini menjelaskan bagaimana aktor mengatasi ketidakpastian dan mengkoordinasikan harapan mereka di sekitar hasil tertentu. Umum diketahui, dianggap sebagai keyakinan bersama bahwa tindakan orientasi, termasuk norma-norma, aturan, lembaga, konvensi, ideologi, adat dan hukum. Ini semua merupakan 'model mental bersama', yang berarti bahwa "dengan setiap perubahan dalam keyakinan, atau setiap perubahan keanggotaan, bentuk budaya yang didasari oleh pengetahuan umum menjadi berbeda secara harfiah") (Wendt, 1999: 159-161).



ETIK DAN POLITIK LUAR NEGERI

Dewasa ini, pembicaraan PLN tidak bisa dipisahkan dengan masalah *ethics*. Memang benar, dalam banyak buku PLN yang diajarkan di berbagai universitas, persoalan etik dianggap tidak penting karena sering diasumsikan bertentangan dengan kepentingan nasional suatu negara. Negara dikatakan harus memaksimalkan kepentingan nasionalnya, sedangkan etik menunjukkan kelemahan suatu negara karena mau berkompromi dalam berhubungan dengan negara lain.

Pandangan demikian tentu saja tidak terlepas dari dominasi realisme dalam PLN selama ini. Dalam asumsi realisme, negara adalah berdaulat dan selalu mengejar kepentingan nasionalnya, termasuk, kalau perlu, dengan merugikan negara lain. Kepentingan moralitas atau etik adalah nomor dua karena yang paling penting adalah kepentingan yang didefinisikan dengan kepentingan untuk *survive* dari ancaman negara lain.

Subordinasi moralitas terhadap kekuasaan ini sering dipandang sebagai fakta dalam kehidupan politik internasional. Kebanyakan orang akan setuju dengan pernyataan Morgenthau bahwa 'tindakan negara-negara ditentukan bukan oleh prinsip-prinsip moral dan

komitmen hukum tetapi pada pertimbangan kepentingan dan kekuasaan' (Morgenthau, 1970: 382). Ini juga didukung dengan pernyataan berikut: 'negara-negara yang berada dalam anarki tidak mampu untuk menggunakan moral. Kemungkinan bagi perilaku berdasarkan moral bergantung pada adanya sebuah pemerintahan efektif yang dapat mencegah dan menghukum tindakan-tindakan ilegal' (Art & Waltz, 1983: 6)

Namun, asumsi realisme sebetulnya tidak sepenuhnya benar. Dari dulu, tidak ada negara yang tidak memperhatikan etik sama sekali dalam PLN-nya. Tujuan ideal suatu negara umumnya untuk kesejahteraan masyarakat dan masyarakat dunia, dan untuk perdamaian abadi sebagaimana terlihat dalam pembukaan UUD Indonesia, misalnya. Negara-negara bekas penjajah, seperti Inggris dan Belanda, merasa mempunyai tanggungjawab terhadap negara bekas jajahannya. Inggris, misalnya, membuat perhimpunan negara-negara Persemakmuran (*Commonwealth*), sedangkan Belanda dulu menggalang dana pembangunan untuk Indonesia lewat IGGI (*Inter-Governmental Group on Indonesia*). Dewasa ini, berbagai negara membantu negara-negara yang mengalami bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor karena alasan kemanusiaan, etik dan moral. Dalam era global di mana muncul berbagai aktor politik internasional yang tidak terbatas hanya pada negara, peran etik menjadi lebih penting.

Etik berkaitan bukan dengan apa yang sudah dan sedang terjadi, tetapi dengan bagaimana negara seharusnya bertindak dalam hubungan dengan negara lain. Berbeda dengan pendekatan realis yang mementingkan hasil berupa keuntungan bagi negara sendiri dalam berhubungan dengan negara lain, politik luar negeri berdasarkan etik berangkat dari motif moral untuk kesejahteraan semua negara dan anggota masyarakat dunia. Kepedulian terhadap kesejahteraan dan perdamaian masyarakat dunia ini adalah suatu fenomena global yang makin kuat. Promosi Hak-hak Asasi Manusia (kemudian disingkat HAM), penghukuman atas kejahatan terhadap kemanusiaan, pelarangan perdagangan senjata kepada kawasan yang tidak stabil atau negara yang melanggar HAM, dan penggunaan senjata khususnya untuk maksud intervensi kemanusiaan adalah

diri sendiri ini juga disebutkan dan mesti dipelihara. Dalam TAC dikatakan penghormatan bersama pada kemerdekaan, kedaulatan, kesederajatan, integritas teritorial dan identitas nasional semua negara; juga hak tiap-tiap negara untuk memajukan kedaulatan nasionalnya bebas dari campur tangan asing, dari subversi atau paksaan. Etika yang baik bagi kaum pluralis adalah etika yang menghargai diversitas, bukan homogenitas. Pluralisme sejalan dengan prinsip dasar ASEAN yang dipraktikkan sampai saat ini, yaitu bahwa tiap anggota mempunyai etika sendiri tetapi mereka juga sepakat dengan suatu kerangka kerjasama di mana mereka saling toleransi, tidak memaksakan pandangan mereka terhadap yang lain. Kedaulatan menjadi prinsip utama yang memungkinkan negara dan budaya mereka bisa eksis satu sama lain secara sejajar.

Namun dalam perkembangannya, etik pluralisme mulai dipertanyakan dalam banyak segi di kalangan ASEAN (Hara, 2007). Di kalangan pemerintah ASEAN sendiri banyak kritik terhadap etik kerjasama yang begitu kukuh mempertahankan asumsi non-intervensi yang membuat banyak kebijakan dan program ASEAN sulit berjalan. Bukan rahasia lagi, pada saat ini sering terjadi kecaman dan kritikan antarpemimpin ASEAN terutama di antara 5 negara pendiri ASEAN terhadap Myanmar yang represif terhadap rakyatnya. Jaringan kerjasama antara NGO di bidang penegakan HAM dan demokrasi serta perlindungan hak-hak pekerja imigran pun semakin meningkat di kawasan. Kepedulian mereka ini tidak dapat dipahami lagi dalam kerangka etik kaum pluralisme, tetapi mulai bergerak ke arah etik kosmopolitanisme.

Pada level kerjasama di mana Indonesia dan Malaysia memainkan peran yang penting, ASEAN pun kini mulai bergerak ke arah kepedulian pada etik kosmopolitan dengan ide Komunitas ASEAN 2020 yang mencakup ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community dan ASEAN Political Security Community (lihat *asean.org*). Dalam komunitas-komunitas itu, kepedulian akan lebih banyak diarahkan kepada kemanusiaan, seperti upaya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan antarnegara atau yang disebut dengan istilah *people-centered* ASEAN (ASEAN yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat). Demikian juga,

mereka mulai membentuk Komisi HAM ASEAN yang bermaksud melindungi hak-hak asasi warga ASEAN. Selain juga konsern mereka sejak lama terhadap rakyat Myanmar yang ditindas oleh pemerintahannya. Semua ini menunjukkan bahwa ASEAN pun bergerak dalam semangat etik kosmopolitan yang makin kuat. Tidak perlu dikatakan, tugas-tugas positif anggota ASEAN lainnya yang telah dilakukan untuk membantu korban-korban kemanusiaan akibat Tsunami dan bencana alam lainnya.[]

I. LANGKAH AWAL MEMILIH PENDEKATAN

Dalam sub-bab ini, dibicarakan bagaimana sebaiknya kita memulainya pendataan sebelum melakukan penelitian. Untuk memulai, pertama-tama, adalah di sini kita dapat melihat bahwa ada dua pendekatan yang dapat kita pilih. Pendekatan pertama adalah pendekatan yang bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan kedua adalah pendekatan yang bersifat kuantitatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti, sedangkan pendekatan kuantitatif lebih menekankan pada pengukuran dan analisis statistik terhadap data yang diperoleh. Kedua pendekatan ini sebenarnya saling melengkapi dan dapat digunakan secara bersamaan dalam penelitian yang komprehensif. Pemilihan pendekatan yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, jenis data yang tersedia, dan kemampuan peneliti dalam menganalisis data tersebut.



BAB VIII

KESIMPULAN: MEMILIH DI ANTARA BERBAGAI PENDEKATAN

Variasi pendekatan dan teori-teori yang ditulis dalam buku ini mungkin telah menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di kalangan pembaca tentang pendekatan dan teori apa yang paling tepat untuk memahami, melihat, menganalisis dan meramalkan suatu pembuatan kebijakan LN di suatu negara. Jawaban sederhana, tentu saja, tidak ada teori yang paling unggul dan tepat. Setiap pendekatan dan teori mempunyai keuntungan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan karena itu penggunaan dan penerapannya pun sangat bergantung pada konteks dan kasus yang sedang dikaji.

Pada bagian ini, akan diuraikan bagaimana memilih pendekatan dan teori-teori di bab-bab sebelum ini secara lebih tepat. Karena penggunaannya secara sporadis bukannya akan membantu menganalisis tetapi malah akan membingungkan. Penggabungan antarpendekatan dan teori-teori secara ambisius juga akan menghasilkan analisis yang kacau dan tidak logis. Setiap pendekatan, perspektif dan teori memiliki sudut pandang sendiri dan pilihan data sendiri atau, dengan kata lain, mempunyai persepsi sendiri tentang data atau pengetahuan apa yang diperlukan dan yang tidak

signifikan. Dengan kata lain, pembicaraan tentang penggunaan teori dan analisis PLN tidak dapat dipisahkan dengan pembicaraan tentang metodologi dan metode penelitian politik luar negeri.

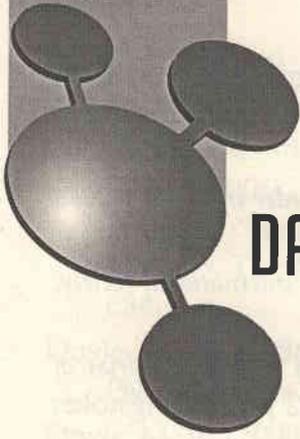
Untuk tujuan itu, bab ini pertama akan membahas asumsi tiap-tiap pendekatan satu per satu disertai pembahasan tentang posisi bab-bab di atas dalam pendekatan metodologi. Terakhir, juga akan dibicarakan metode penelitian dan penulisan PLN dengan menggunakan contoh kasus.

I. LANGKAH AWAL MEMILIH PENDEKATAN

Dalam sub-bab ini, dibicarakan bagaimana sebaiknya kita memilih pendekatan sebelum melakukan penelitian tentang PLN suatu negara. Secara sederhana, dibahas di sini ihwal kapan kita bisa menggunakan realisme, idealisme dan pendekatan-pendekatan lain yang telah diuraikan dalam bab-bab buku ini untuk menganalisis PLN suatu negara.

Salah satu kesulitan dalam melakukan analisis PLN adalah dominasi realisme dan konsep *power* yang digunakannya. Para mahasiswa dan pengkaji PLN biasanya mencari jalan yang mudah dan simpel dalam menganalisis PLN. Realisme biasanya menjadi pilihan mereka, karena dalam pendekatan realisme terdapat konsep-konsep *power* dan kepentingan nasional yang sangat fleksibel. Banyak kasus atau hampir semua kasus bisa dijelaskan atau dikaitkan dengan *power* dan kepentingan nasional. Bahkan, bantuan kemanusiaan terhadap korban tsunami pun bisa dijelaskan atau dikaitkan dengan peningkatan *power* dan pengaruh dari negara yang memberi bantuan. Tetapi kalau semua bisa dijelaskan oleh realisme, apa fungsi pendekatan-pendekatan lain yang dikaji di sini? Apakah pendekatan yang lain tidak usah dihiraukan?

Jawaban terhadap persoalan di atas sebenarnya bukanlah bahwa Anda harus memilih realisme atau yang lain, tetapi adalah tentang memilih penjelasan dari perspektif mana yang LEBIH TEPAT



DAFTAR PUSTAKA

- Adler, E. (2002). Constructivism and International Relations. In W. Carlsnaes, B. A. Simmons & T. Risse-Kappen (Eds.), *Handbook of international relations* (pp. xx, 571 p.). London: SAGE.
- Allison, G. T. (1971). *Essence of decision : explaining the Cuban missile crisis* ([18th print.] ed.). Boston [Mass.]: Little, Brown.
- Art, R. J., & Waltz, K. N. (1983). *The Use of Force : international politics and foreign policy* (2nd ed. ed.). Lanham, London: University Press of America.
- Ayip, Zainuddin. 2007. "Bersama Diplomat: Indonesia mahu perbetul tanggapan", *Berita Harian*, 15 November 2007.
- Beitz, C. R. (1979). *Political theory and international relations*. Princeton, Guildford: Princeton University Press.
- Braybrooke, D., & Lindblom, C. E. (1963). *A strategy of decision: policy evaluation as a social process*: Free Press of Glencoe, Collier-Macmillan.
- Brown, C. (1993). *Political restructuring in Europe: ethical perspectives*. London: Routledge.

- Brown, C. (2001). Ethics, Interests and Foreign Policy. In K. E. Smith & M. Light (Eds.), *Ethics and foreign policy* (pp. xi, 223 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Bull, H. (2002). *The anarchical society: a study of order in world politics* (3rd ed. ed.). Basingstoke: Palgrave.
- Bull, H., & Watson, A. (1984). *The Expansion of international society*. Oxford: Clarendon.
- Burchill, S. (2009). Liberalism. In S. Burchill (Ed.), *Theories of international relations* (4th ed. ed., pp. ix, 382 p.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Buzan, B. (1999). 'The English School as a Research Program: an overview, and a proposal for reconvening'. Paper presented at the Paper for the Panel 'A Reconsideration of the English school: close or reconvene?' BISA Conference Manchester.
- Buzan, Barry, Wæver, Ole and de Wilde, Jaap. 1997. *Security: A New Framework for Analysis*, Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- Carlsnaes, W. (2002). Foreign Policy. In W. Carlsnaes, B. A. Simmons & T. Risse-Kappen (Eds.), *Handbook of international relations* (pp. xx, 571 p.). London: SAGE.
- Chandler, D., & Heins, V. (2007). *Rethinking ethical foreign policy : pitfalls, possibilities and paradoxes*. London: Routledge.
- Cochran, M. (2001). A Pragmatist Perspective on Ethical Foreign Policy. In K. E. Smith & M. Light (Eds.), *Ethics and foreign policy* (pp. xi, 223 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Copeland, D. C. (2006a). *Constructing a new orthodoxy?: Wendt's Social theory of international politics and the constructivist challenge*. New York, NY: Routledge.
- Copeland, D. C. (2006b). The Constructivist Challenge to Structural Realism: a review essay. In S. Guzzini & A. Leander (Eds.), *Constructivism and international relations: Alexander Wendt and his critics* (pp. xxii, 246 p. ill.). London, New York: Routledge.
- Daery, Viddy A.D. 2007. "Penyelesaian Kasus Lagu-lagu Serumpun", *Jawa Pos*, 15 November.

- Doty, R. L. (1993). Foreign Policy as Social Construction: A Post-Positivist Analysis of U.S. Counterinsurgency Policy in the Philippines. *International Studies Quarterly*, 37(3), 297-320.
- Doyle, M. (2006). Michael Doyle. 1986. "Liberalism and World Politics." *American Political Science Review* 80 (December): 1151-69. *The American Political Science Review*, 100(4), 683-684.
- Doyle, M. W. (1986). Liberalism and World Politics. *The American Political Science Review*, 80(4), 1151-1169.
- Doyle, M. W. (2008). Liberalism and Foreign Policy. In S. Smith, A. Hadfield & T. Dunne (Eds.), *Foreign policy : theories, actors, cases* (pp. xxvi, 442 p.). Oxford: Oxford University Press.
- Dunne, T., & Schmidt, B. (2001). Realism. In J. Baylis & S. Smith (Eds.), *The globalization of world politics : an introduction to international relations* (2nd. ed., pp. xxx, 690 p.). Oxford: Oxford University Press.
- Dunne, T., & Wheeler, N. J. (2001). Blair's Britain: a force for goon in the world? In K. E. Smith & M. Light (Eds.), *Ethics and foreign policy* (pp. xi, 223 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Evangelista, M. (1999). *Unarmed forces : the transnational movement to end the Cold War*. Ithaca, N.Y. ; London: Cornell University Press.
- Fachir, M. (2007). 'Hubungan RI-Malaysia sesudah 50 tahun "Cabaran dan Harapan''. Paper presented at the Talk at Universiti Utara Malaysia, UUM.
- Finnemore, M. (1996). *National interests in international society*. Ithaca, N.Y., London: Cornell University Press.
- Frankel, B. (1996). Restating the realist case: An introduction. *Security Studies*, 5(3), 9 - 20.
- Frost, M. (1996). *Ethics in international relations: a constitutive theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Frost, M. (2001). *The Ethics of Humanitarian Intervention: Protecting Civilians to Make Democratic Citizenship Possible*.

- In K. E. Smith & M. Light (Eds.), *Ethics and foreign policy* (pp. xi, 223 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man*. New York: Free Press, Toronto: Maxwell Macmillan Canada.
- Ghazali, Abdullah Zakaria. 2007., "Malaysia-Indonesia dalam Sejarah: Liku-Liku Hubungan Serumpun Sehingga Kurun Ke-19", Makalah dipresentasikan pada Seminar 50 Tahun Merdeka: Hubungan Malaysia Indonesia di Universiti Malaya, Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 17 Juli 2007.
- Haas, E. B. (1993). 'Beware the Slippery Slope: Notes Toward the Definition of Justifiable Intervention' Inst. Int. Stud. Policy Paper. (Vol. No. 42, pp. 278 p.). Berkeley, CA.: University of California.
- Hara, A. E. (2007). 'Transnational Threats to ASEAN Security: a Plea to Renew the Spirit of Cooperation'. *Journal of International Studies*, 3.
- Hara, A. E. (2009). 'Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Mengatasi Masalah Alam Sekitar' Persidangan Hubungan Malaysia-Indonesia'. Paper presented at the Persidangan Hubungan Indonesia-Malaysia III, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
- Held et al., D. (1999). *Global transformations: politics, economics and culture*. Oxford: Polity.
- Held, D. (1995). *Democracy and the global order: from the modern state to cosmopolitan governance*. Cambridge: Polity.
- Held, D., & McGrew, A. G. (2000). *The global transformations reader : an introduction to the globalization debate*. Malden, Mass.: Polity Press.
- Hermann, C. F., Kegley, C. W., & Rosenau, J. N. (1987). *New directions in the study of foreign policy*. Boston, London: Allen & Unwin.
- Hermann, M. G. (1980). Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*, 24(1), 7-46.

- Hermann, M. G., & Hermann, C. F. (1989). Who Makes Foreign Policy Decisions and How: An Empirical Inquiry. *International Studies Quarterly*, 33(4), 361-387.
- Hill, C. (2003). *The changing politics of foreign policy*. Basingstoke: Palgrave MacMillan.
- Hoffmann, Arthur and Kerry Longhurst .1999. "German Strategic Culture and the Changing Role of the Bundesweh", *WeltTrends*, No. 22.
- Holsti, K. J. (1983). *International politics : a framework for analysis* (4th ed. ed.). London: Prentice-Hall.
- Holsti, O. R., & Rosenau, J. N. (1984). *American leadership in world affairs : Vietnam and the breakdown of consensus*. Boston [Mass.], London: Allen & Unwin.
- Hopf, T. (2002). *Social construction of international politics : identities and foreign policies, Moscow, 1955 and 1999*. Ithaca, London: Cornell University Press.
- Houghton, D. P. (2007). Reinvigorating the Study of Foreign Policy Decision Making: Toward a Constructivist Approach. *Foreign Policy Analysis*, 3(1), 24-45.
- Hudson, V. M. (2008). The History and Evolution of Foreign Policy Analysis. In S. Smith, A. Hadfield & T. Dunne (Eds.), *Foreign policy: theories, actors, cases* (pp. xxvi, 442 p.). Oxford: Oxford University Press.
- Hudson, V. M., & Vore, C. S. (1995). Foreign Policy Analysis Yesterday, Today, and Tomorrow. *Mershon International Studies Review*, 39(2), 209-238.
- Hussain, Madzlan Mohamad. 2007. "Cara Melayan Imigran", *Utusan Malaysia*, 14 November 2007.
- Ishak, M. M. (2007). 'Peranan Tun Adam Malik dalam Membina Hubungan RI-Malaysia'. Paper presented at the Annual Lecture Mengenang Tokoh Diplomasi Adam Malik: Apresiasi Perjalanan 50 tahun Hubungan Diplomatik RI-Malaysia', Medan.

- Jackson, R. H. (2007). Social Constructivism. In R. H. Jackson & G. Sørensen (Eds.), *Introduction to international relations : theories and approaches* (3rd ed. ed., pp. xxvi, 342 p.). Oxford: Oxford University Press.
- Janis, I. L. (1972). *Victims of groupthink; a psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes*, Boston, Houghton, Mifflin.
- Jervis, R. (1976). *Perception and misperception in international politics*. Princeton, N.J., Guildford: Princeton University Press.
- Johnston, A. I. (1996). Learning Versus Adaptation: Explaining Change in Chinese Arms Control Policy in the 1980s and 1990s. *The China Journal* (35), 27-61.
- Johnston, Alastair Iain. 1995. "Thinking about Strategic Culture", *International Security*, 19: 4.
- Katzenstein, P. J. (1996). *The culture of national security : norms and identity in world politics*. New York, Chichester: Columbia University Press.
- Keal, P. (1992). *Ethics and foreign policy*. Canberra: Allen & Unwin in association with Department of International Relations, RSPacS, ANU.
- Kegley, C. W., & Wittkopf, E. R. (1987). *American foreign policy : pattern and process* (3rd ed. ed.). Basingstoke: Macmillan Education.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and Interdependence: world politics in transition*. New York: Little Brown.
- Knorr, K. (1969). *NATO : past, present, prospect*. N.Y.: Foreign Policy Association.
- Kratochwill, F. (1989). *Rules, norms and decisions : on the conditions of practical and legal reasoning in international relations and domestic affairs*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lebow, R. N., & Stein, J. G. (1994). *We all lost the cold war*. Princeton, N.J., Chichester: Princeton University Press.
- Leifer, M. (1983). *Indonesia's foreign policy*. London: Published for the Royal Institute of International Affairs by Allen & Unwin.
- Light, M. (2001b). Exporting Democracy. In K. E. Smith & M. Light (Eds.), *Ethics and foreign policy* (pp. xi, 223 p.). Cambridge: Cambridge University Press.

- Liow, J. C. (2005). *The politics of Indonesia-Malaysia relations : one kin, two nations*. London: RoutledgeCurzon.
- Liow, Joseph Chinyong. 2004. *The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations*. New York: Routledge Curzon.
- MacDonald, D. B., Patman, R. G., & Mason-Parker, B. (2007). *The ethics of foreign policy*. Aldershot, England, Burlington, VT: Ashgate.
- March, J. G., & Simon, H. A. (1967). *Organizations*. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Mearsheimer, J. J. (2007). Structural Realism. In T. Dunne, M. Kurki & S. Smith (Eds.), *International relations theories: discipline and diversity* (pp. 71-88). Oxford: Oxford University Press.
- Morgenthau, H. J. (1970). *Truth and power, essays of a decade, 1960-70*. New York: Praeger.
- Narayanan, Suresh and Yew-Wah Lai. 2005. 'The Causes and Consequences of Immigrant Labour in the Construction Sector in Malaysia', *International Migration*, 43 (5).
- Ohmae, K. (1995). *The end of the nation state: the rise of regional economies*. London: Harper Collins.
- Onuf, N. G. (1989). *World of our making: rules and rule in social theory and international relations*. Columbia, S.C.: University of South Carolina Press.
- Pettman, R. (1975). *Human behaviour and world politics: a transdisciplinary introduction*. London: Macmillan.
- Picken, M. (2001). Ethical foreign policies and human rights: dilemmas for non-governmental organizations In K. E. Smith & M. Light (Eds.), *Ethics and foreign policy* (pp. xi, 223 p.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed. ed.). Cambridge, Mass. ; London: Belknap.
- Risse-Kappen, T., Ropp, S. C., & Sikkink, K. (1999). *The power of human rights : international norms and domestic change*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Rosecrance, R. N. (1986). *The rise of the trading state : commerce and conquest in the modern world*. New York: Basic Books.
- Rosenau, J. N. (1966). *Pre-Theories and Theories of Foreign Policy*. Evanston: Northwestern University Press.
- Shapcott, R. (2008a). International Ethics. In J. Baylis, S. Smith & P. Owens (Eds.), *The globalization of world politics : an introduction to international relations* (4th ed. ed., pp. xxxix, 622 p.). Oxford: Oxford University Press.
- Simon, H. A. (1982). *Models of bounded rationality*. Cambridge, Mass., London: MIT Press.
- Smith, K. E. (2001). *The EU, Human Rights and Relations with Third Countries: 'Foreign Policy' with an Ethical Dimension?* Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, K. E., & Light, M. (2001a). *Ethics and foreign policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Snyder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, A. (1962). *Foreign Policy Decision-making. An approach to the study of international politics*. [Articles by various authors.] Edited by R. C. Snyder, H. W. Bruck, Burton Sapin: pp. vii. 274. Free Press of Glencoe: New York.
- Sprout, H., & S., M. (1969). *Environmental Factors in the Study of International Politics*: New York: Free Press, London: Collier-Macmillan.
- Sprout, H., & Sprout, M. (1957). Environmental Factors in the Study of International Politics. *The Journal of Conflict Resolution*, 1(4), 309-328.
- Strange, S. (1996). *The retreat of the state: the diffusion of power in the world economy*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Strange, S. (1998). *Mad money*. Manchester: Manchester University Press.
- Sukma, R. (2007, 24 September). 'Jernihkan erti 'serumpun' antara Indonesia-Malaysia', *Berita Harian*.
- Sulaiman, Yohanes. 2007. "Soekarno, Malaysia, dan PKI", *Kompas*, 29 September.

- Tannenwald, N. (2005). Stigmatizing the Bomb: Origins of the Nuclear Taboo. *International Security*, 29(4), 5-49.
- Thamrin, Yuri O. 2007. "50 Tahun Indonesia-Malaysia: Harapan dan Tantangan ke Depan", paper disampaikan pada *Annual Lecture Mengenang Tokoh Diplomasi Adam Malik: Apresiasi Perjalanan 50 tahun Hubungan Diplomatik RI-Malaysia*, Medan 24 Februari 2007.
- Visi Indonesia 2030, retrieved 12 November 2007 from <http://ppij-nagoya.org/MISC/Buklet%20Visi%Indonesia%202030%5b1%5d.pdf>.
- Walt, S. M. (1987). *The origins of alliances*. Ithaca: Cornell University Press.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Reading, Mass., London: Addison-Wesley.
- Wawasan 2020, Biro Tata Negara, Jabatan Perdana Menteri, 1991.
- Weinstein, FB. 1976. *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Wendt A. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge University Press.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 391-425.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Williams, P. (2005). *British foreign policy under New Labour, 1997-2005*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Wittkopf, E. R. (1990). *Faces of internationalism: publik opinion and American foreign policy*. Durham; London: Duke University Press.
- Wohlforth, W. C. (2008). Realism and Foreign Policy. In S. Smith, A. Hadfield & T. Dunne (Eds.), *Foreign policy: theories, actors, cases* (pp. xxvi, 442 p.). Oxford: Oxford University Press.
- Yong, J. L. C. (2003). 'Visions of Serumpun': Tun Abdul Razak and the golden years of Indo-Malay blood brotherhood,

- 1967-75. *South East Asia Research*, 11, 327-350. doi: 10.5367/000000003772657391
- Yong, J.L.C. 2003. "Visions of 'Serumpun': Tun Abdul Razak and the golden years of Indo-Malay blood brotherhood, 1967-75", *South East Asia Research*, Vol. 11, No. 3, November.
- Zain, Shahrir Mohamad. 2003. "Penyebaran Orang Rumpun Melayu Pra-Islam dan Perkembangan Tulisan Bahasa Melayu", *Sari*, 21.
- Zakaria, F. (1998). *From wealth to power: the unusual origins of America's world role*. Princeton, N.J., Chichester: Princeton University Press.
- Zehfuss, M. (2002). *Constructivism in international relations: the politics of reality*. Cambridge, England: Cambridge University Press. •